

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 12

No.1, Juni 2019

Halaman 1 - 16

Coppo Lalabata Tanete Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Tompo Bulu Matajang Kabupaten Barru (Studi Sejarah, Antropologi, dan Arkeologi)

Andi M. Anwar Zaenong

IAIN Parepare

anwarsaenong@iainpare.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the term *Coppo'* cultured area in Tanete, where the Saoraja La Pinceng palace is located; in addition to the function of the King's residence, also the place where each Royal Stakeholder is crowned. Data collection techniques through in-depth interviews and documentation. The results showed that *Coppo'* is one of historical heritages; *Coppo'* is culturally inherited by the descendants of *Arung Tompo Bulu Matajang*. *Coppo* is the *Arajang* land of the Bugis language, but since 1960 in the hands of the Seven Co-operative, the land has been controlled by a 20 hectare community. On the land, the deed of ownership in *Land Rante* was recorded. With *Pasolong*, as with ownership on the land stands the *La Pinceng* Palace of the *Balusu* Kingdom. *Dg Parani*. The relationship between the two owners in their lineage is related to Tanete, Soppeng and Barru; *Dg Pasolong* and *Dg. Parani*; both are Ornament landowners, who are in the *Saoraja* grounds in Barru Regency; *La Pinceng* in *Coppo'* of the Kingdom of Tanete, *La Pinceng* in *Bulu Dua* of the *Balusu* Kingdom. In *Coppo'* called the *bola' Ale*, in *Bulu Dua* it is called *Jongke' Bola*.

Keywords: *Coppo Lalabata, Tompo Bulu Kingdom*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas term *Coppo'* wilayah berbudaya di Tanete, di sana tempatnya istana *Saoraja La Pinceng*; selain fungsinya kediaman Raja, juga tempatnya setiap Pemangku Kerajaan dinobatkan. Teknik pengumpulan datanya melalui *indepth interview* dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Coppo'* adalah salah satu peninggalan sejarah; secara kultural *Coppo'* diwarisi keturunan Pemangku *Arung Tompo Bulu Matajang*. *Coppo* adalah tanah *Arajang* bahasa Bugis, namun sejak 1960 di tangan Koperasi Tujuh lahannya berubah

dikuasai masyarakat seluas 20 ha. Di atas lahan tersebut, akta kepemilikannya di *Land Rante* tercatat an. *Dg Pasolong*, seperti halnya kepemilikan di atas tanah berdiri Istana *La Pinceng* Kerajaan Balusu an. *Dg Parani*. Hubungan antara kedua pemilik di atas silsilahnya terkait antara Tanete, Soppeng dan Barru; *Dg. Pasolong* dan *Dg. Parani*; keduanya pemilik tanah *Ornament*, yang pekarangan *Saoraja*¹ di Kabupaten Barru; *La Pinceng* di Coppo' Kerajaan Tanete, *La Pinceng* di Bulu Dua Kerajaan Balusu. Di Coppo' disebut *Ale' Bola*, di Bulu Dua disebut *Jongke Bola*.

Kata Kunci: *Coppo Lalabata, Kerajaan Tompo Bulu*

PENDAHULUAN

Tercatat di Indonesia sebanyak 19 wilayah adat, di antaranya salah satu wilayah sebagai Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan (Jamali : 1999, 71-2). Oleh sebab itu, di seluruh nusantara Republik Indonesia secara historikal obyektif; terdiri atas berbagai negeri tradisional adat yang berada di bawah pilar kebangsaan bergelar Bineka Tunggal Ika. Sekarang ini semuanya sejajar dibangun dan berkembang sebagai negara modern dengan sistem konfederasi atau kesatuan; dan tentu saja dari setiap negeri di seluruh Indonesia tidak terlepas dengan kekayaan nilai-nilai sejarah.

Dalam hal Negara Republik Indonesia setelah dalam kemerdekaannya dipimpin Kepala Negara Ir. Soekarno, beliau dalam salah satu pidatonya berkata; jangan sekali-kali melupakan sejarah sebagai disingkat Jas Merah (Berita Harian Fajar, 16 Oktober 2011). Itulah berdasarkan negeri-negeri adat, secara diakronik lebih dahulu berdiri dari pada keseluruhan wilayah yang terbentuk sesudahnya dengan sistem modernisasi/pembangunan, terutama dari sistem ketatanegaraannya sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, dan kini sedang dihadap oleh kekacauan semakin tak diketahui ke mana arahnya, apakah ke Barat, Islam, atau Adat; akan tetapi sejauh berkembang dengan sistem modernisasi, tampaknya dibangun di atas tiga sistem yang menyatu di antara satu sama lainnya. Itu berarti di Indonesia belum jelas untuk disebut negaranya berwarna seperti apa, kecuali untuk sementara belum berhenti mencari bentuknya; sistem Falsafah Pancasila dan Bineka Tunggal Ika sebagai dijagokan sistem bernegara di dunia ini belum ada duanya. Dengan demikian, maka sistem perpolitikan se Indonesia lebih menarik digelar sistem berpolitik negara banci.

Sejauh ketatanegaraan di Indonesia sebagai terkoyak-koyak dengan sistem modernisasi, sehingga dari seluk beluknya telah mengundang sekelompok warga kembali memilih berbagai sikap, salah satunya memilih perspektif sejarah. Terungkap misalnya dari Islam dengan wacana Penegakan Syariat Islam/ Khilafah, juga tidak kalah pentingnya perspektif yang berkiprah

tradisional adat (*ade'*/Bugis) dengan kembali menghidupkan wacana pranata politik tradisional/adat, sebagaimana dalam kesimpulan Assosiasi Kraton-Kraton se Indonesia tgl 29-30 Mei 2007 di Makassar; bahwa tidaklah ada artinya Bupati dan Gubernur tanpa dengan adanya sistem politik budaya di setiap daerah atau provinsi. Dengan demikian, di sini terlihat sekali keinginan untuk kembali berpolitik dengan dua sistem pranata kultural, apakah keduanya bakal kembali menyatu dengan sistem struktural tradisional, di Sulawesi-Selatan disebut "*Panngadereng*".

Tentu bertolak dari dua hal di atas; sara' dan adat, secara normatif di antara keduanya berhubungan sekali, selain mengingat falsafah Melayu; Adat bersendi Sara' atau Sara' bersendi Kitab Allah, juga dalam bahasa Bugis; *Mapakaraja'I Sara' E Ri Ade'E, Mapakalebi'I Ade'E ri Sara'E* Artinya: Sara' Mengagungkan Adat, dan Adat memuliakan Sara' ,(Proyek Naskah UNHAS: tth, 155). Sesungguhnya antara adat dan sara' dalam sejarah merupakan ideologi politik yang tak dapat dipisahkan, dalam bahasa Bugis, *Sibolai Ade'E Sara'E/Aja' Mupasisalai* Artinya : Adat dan Sara' serumah, jangan dipertentangkan Adat berasal dari lingkungan bersifat natural, hubungannya dengan manusia tak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Adapun Sara' ajaran bersifat absolut berasal dari Allah swt. Oleh sebab itu, sistem politik di Indonesia bukan sepenuhnya diterima, jikalau tidak bersumber dari sejarah; adat dan agama. Kedudukan Adat dalam Islam secara induktif disambut dengan kaidah hukum, "*Al Adat Al Muhakkamah*" (Abu Zahrah: 1987, 254-56).

Dengan demikian, kalau saja sistem bernegara sekarang ini dianggap sulit ditegakkan, maka representatifnya di Indonesia tiada lain kembali kepada sistem politik tradisional *ade'*/adat. Dalam hal ter-sebut, di Sulawesi-Selatan, yakni kembali kepada sistem tradisional "*Panngadereng*" (Mattulada: 1955, 344). strukturalnya meliputi *ade', bicara, wari', rapang*, dan *sara'*.

Sulawesi-Selatan dalam teritorialnya sebagai salah satu wilayah adat tradisional, perspektifnya dalam sejarah terdiri atas beberapa kerajaan, terdapat di antaranya jenis kerajaan besar terbilang "*Bocco'* ", sebagai induk atau sentral. Juga jenis kerajaan kecil terbilang "*lili'* " berdiri sebagai negara bagian atau daerah protektorat di bawah kerajaan besar, semua di antara selainnya senantiasa bersinergi bagaikan federasional negara-negara. Misalnya, Kerajaan Tanete, Nepo, Balusu; sekarang saja semuanya di bawah administrasi Kabupaten Barru, atau daerah sebelumnya selain digelar negeri federal juga bersekutu dengan Kerajaan Soppeng, Bone dan Suppa; selain bersekutu disebabkan hubungan emosional etnis, juga dengan kesadaran berserikat dan bersatu.

Dengan demikian, kerajaan mana di antaranya sebagai induk bergerak lebih besar disebut “ *Bocco* ” bahasa Bugis, misalnya Kerajaan Bone bersama dengan sekutunya Soppeng dan Wajo. Selanjutnya dari kebesaran dimiliki, dibawa bersinergi dengan kerajaan-kerajaan yang sama besarnya se Sulawesi-Selatan, yaitu Luwu dan Gowa. Semuanya menyatu di dalam satu wilayah persekutuan yang lebih tinggi tradisionalnya di Sulawesi-Selatan dikenal “*TellumpoccoE* ”, dan ketiganya secara simbolis terkenal berwibawa sebagai kerajaan-kerajaan puncak bergelar *Pajung ri Luwu*, *Somba ri Gowa*, dan *Mangkau ri Bone*.

Coppo’ Lalabata Tanete di wilayah bekas Kerajaan Tanete, kiprahnya telah terselubungkan sejak kejatuhan *Panngadereng* di Sulawesi-Selatan 1906 di area peninggalan Kerajaan Tanete beradat, sehingga untuk pertanyaannya, Bagaimana *Coppo Lalabata Tanete* dan hukum kepemilikannya di Matajang sebagai suatu sistem peninggalan politik tradisional (bekas Kerajaan Tanete) Kabupaten Barru ?

PEMBAHASAN

Sistem Panngadereng di Kabupaten Barru

Di salah satu wilayah di Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan, di sana tersimpan kelalaian sejarah terhadap sebuah basis kerajaan bergengsi, dibanding misalnya Nepo, Balusu dan Barru. Tersimpan kelalaian sejak lama, diperkirakan lebih seabad terjadi di Kerajaan Tanete. Dalam sistem pemerintahan dewasa ini, bekas Kerajaan Tanete telah menjelma sebagai wilayah salah satu kecamatan di Kabupaten Barru, dan setelah bernegara hidup berkembang dan dibangun lebih modern, karenanya telah diadakan pemekaran menjadi tiga; Tanete Rilau, Tanete Riaja dan Pujananting.

Di seluruh Nusantara Republik Indonesia., khususnya di Sulawesi-Selatan, kerajaan merupakan sistem politik bersejarah, secara tradisional berperanan memelihara peninggalan leluhur, sehingga berkiprah dengan istilah misalnya *To Manurung* atau *Manurung’E* dan *Arajang* semuanya dipercaya dalam konteks budaya yang mengekspresikan sistem peradaban asli Indonesia. Oleh sebab itu, betapapun kecilnya suatu kerajaan dalam sejarah, apalagi terhitung kerajaan induk/besar dan berpengaruh, maka sikap memelihara-nya atau melestarikannya; selain merupakan semangat heroisme terhadap bangsa, juga mencintai tanah air dan budaya sendiri. Sebaliknya memilih sikap apriori atas keterpurukan sistem politik tradisional, maka sikapnya merupakan sifat kekerdilan hati, karena mereka tetap saja berulah dengan mengutamakan kebudayaan modern, atau se akan-akan sudah menebus dirinya selaku bangsa biadab di negerinya sendiri.

Peradaban modern mulai berkembang pada abad XVIII di Barat, kemudian menyusup ke Dunia Timur, semua elemennya sudah diterima, baik dengan melalui perdagangan dan penjajahan, maupun dengan kemajuan sains dan teknologi, terutama pada abad XIX dalam sejarah dijadikan saat, bahwa penjajahan Barat telah menyapu jagat Dunia Timur sebagai Imperiumnya (Syalabi Ahmad: 1988, 73). Dunia paling terjajah adalah kawasan negara Islam, semuanya telah terkontak dijajah kecuali Arab Saudi dan Turki Usmani. Dan tidak kurang pentingnya di sini dikemukakan, bahwa di atas bumi Indonesia sendiri sebagai bekas negeri-negeri tradisional/adat, telah digalak dan digagahi kolonial Barat selama 3 (tiga) setengah abad, yakni Inggris, Belanda, Portugis dan Amerika, dan selainnya penjajahan Jepang dari bangsa Kolonialisme Timur.

Oleh sebab itu, sepanjang Indonesia dijajah dan berkibarnya angin pembaharuan atau pembangunan, maka semua elemen bangsa mengalami kebijakan modernisasi, terutama perubahannya di bidang politik, sehingga basis pranata politik tradisional harus diganti dengan pranata republik demokrasi, nasionalisme serta seluruh isme-isme yang berkumandan di abad modern. Bukankah sekarang saja, pembangunan di mana-mana telah dirasakan dampaknya; bahwa peradaban modern bukan hanya sekadar menyisakan kebaikan untuk generasi bangsa Indonesia, tetapi terbanyak telah mengotak-atik kultural adat dan agama, sehingga semuanya telah terkoyak-koyak dengan krisis ketuluan/keikhlasan dan kejujuran.

Tentu saja berdasarkan fakta, bangsa Indonesia telah lebih separuh abad menjalankan kemerdekaan dari Kerajaan Belanda, namun kiranya belum terhitung kembali menarik jarum sejarah untuk mendapatkan kemerdekaan sejati, kecuali tampaknya bersifat penjajahan yang diperpanjang dari kalangan bangsa sendiri bergelar *Sianre Bale Tauwe* bahasa Bugis Artinya : Siapa yang kecil dimakan seperti keadaannya ikan. Perubahan sistem politik sebagai dipraktekkan dalam kebijakan bernegara, hanya saja menyita waktu yang menelan biaya berlebihan dan mubazir, serta hasil dan nilainya pun sisa keterpurukan, atau saja sekadar misi bersandiwara dalam permainan politik tak berkesudahan, dan menjauhkan dari kehidupan rakyat yang sejahtera, adil dan makmur.

Di kawasan daerah-daerah sebelum terbentuk Kabupaten Barru dan sekitarnya, telah ditata dengan 4 Swapraja / bekas kerajaan versi Belanda, yaitu, Tanete, Barru, Balusu, dan Nepo. Keempatnya diberi hak otonom/Swapraja (Berita Harian Fajar, 18 Pebruari 2003). Bekas Kerajaan Balusu/Kiru-Kiru dan

Nepo menjadi Swapraja Soppeng Riaja dan Mallusetasi, bekas Kerajaan Tanete dan Barru tanpa perubahan nama menjadi Swapraja Tanete dan Barru.

Setiap Penjabat berbaju tradisional Pemangku sebagai di atas, mereka merupakan Ketua-Ketua Swapraja, dan kepadanya diberi gelar tradisional Raja di mana seorang Ketua/Kepala bertahta. Misalnya, dengan berbagai gelar berbeda antara satu dan lainnya; *Datu ri Tanete*, *Petta ri Berru* dan *Malusetasi*, dan *Arung ri Soppeng Riaja*. Mereka bukan sekadar tampaknya berbeda kultural di setiap tempat, tetapi dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, semuanya sama di bawah naungan Kerajaan Belanda; sehingga secara administratif bagi mereka tidak dikenal adanya perbedaan derajat di antara satu sama lainnya.

Sebelum Perang Dunia II, di Sulawesi-Selatan terdapat 30 Swapraja asli (Mattulada; 467), jadi alangkah banyaknya; 4 (empat) di antaranya bekas Swapraja berada di daerah bekas *Onderafdeling* yang menjelma Kabupaten Barru. Ketua-Ketua Swaprajanya setingkat dengan Ketua-Ketua Swapraja dari bekas kerajaan “*Bocco*”, misalnya Bone, Luwu, Gowa, Soppeng dan Wajo. Oleh sebab itu, di Kabupaten Barru dalam reputasinya memiliki keunikan dan bisa dibanggakan dalam konteks budaya. Tetapi, sejauh ini mengapa kiranya belum tampak berarti, padahal di Tanete banyak menyimpan situs budaya yang menakjubkan, seperti istilah *Sao Tanre* dalam Lontara, salah satu Istana Kerajaan terkenal bukan main tingginya, dan sebagainya. Itulah barangkali sepanjang namanya “*Panngadereng*” berhenti di Sulawesi-Selatan, maka sejak itu apa dan bagaimana seharusnya, menjadi bukan seharusnya, atau sebaliknya. Seperti ini dalam bahasa Bugis, berkata, *Sala’E ri Patuju*, *Tuju’E ri Pasala*. Artinya : Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan.

Terjadi misalnya, di Coppo Lalabata Tanete, dahulu adalah tempat kebanggaan bersejarah, namun karena sistem sosial politik berikutnya berubah sekali, dan kondisi alamiah tampaknya tidak mendukung; sehingga Coppo di dalam artinya tempat ketinggian dan puncak kebudayaan, namun kiranya sudah lebih se abad dipermukaan sejarah tidak tampak menunjukkan di antara satu budaya “*Panngadereng*” di Kabupaten Barru; suasananya terlihat tenggelam dan tersembunyikan sebagai hal yang dikhawatirkan orang-orang sepanjang waktu, Karena Coppo’ bagi orang-orang tertentu di Kabupaten Barru, dianggapnya peninggalan sejarah yang berakar tunggang untuk kebangkitan kembali budaya “*Panngadereng*” suasananya kembali kepada sistem sediakala. Sehingga setiap orang berbasis peninggalan kolonial saja dianggap *To Masaleppang Akkarungeng* Artinya : Orangnya berkedudukan tak berbeda dengan pejabat sekarang ini, dengan sendirinya terlikwidasi. Itulah halnya, sejauh sekarang persoalannya didudukkan sementara secara alamiah, bukan hendaknya didadak secara

revolusioner, melainkan visi dan misinya tetaplah bersahaja dirangkul, di samping waktunya ditunggu kapan saja terjadi di antara manusia, sebagai-mana diingatkan dalam prinsip tradisional berkata, *ri Sapa'po Muo'mpo', ri Jelo'po Muakengau Artinya* : Nanti dicari baru muncul, nanti ditunjuk baru mengiya atau iye.

Gambaran di atas, adalah berhubungan sekali dengan teori sejarah dan sosiologi, bahwa sesudah waktu seabad dalam pengalaman hidup manusia akan terjadi perubahan sosial. Dan teori tersebut sesuai dengan sebuah doktrinal Islam atau Sunah, bahwa setiap dalam satu kurun waktu atau seratus tahun terdapat orang atau kelompok pembaharu atau reformator (Wensinck: 1936, 324). Dalam hal ini, sangat sejalan dengan kearifan lokal berbahasa Bugis; "*Narekko' Narapi'ni Kajajian MappuralaloE, Sipangngumuruken Tauni Ettana, Majeppu Lesuni Kajajiang Puralalo'E Makkuling Parimeng* ".Artinya : Kapan kala kejadian masa lalu sudah seratus tahun berlalu, seperti seumur hidup manusia, maka kejadian itu sudah ditunggu berulang

Falsafah dan Situs Budaya "Panngadereng " di Coppo' Lalabata Tanete

Tatkala disebut "*Panngadereng* " di Sulawesi-Selatan tidak berjalan, terdapat wasiat/pasen orang-orang arif di Tanete berkata; "*Aja' Muengka Salaiwi Tanete Narekko' Engkani Titti' Onroiwi Titina, Nareko' Engkani Mopang Onroiwi Aleke'na. Artinya* : Jangan kamu tinggalkan Tanete, jika keadaannya telah miring, tinggallah di pemiringannya, dan jika keadaannya telah bertelungkup-tiarap, tinggallah di punggungnya.

Tentu saja berdasarkan wasiat di atas, di antaranya orang tak jarang bersifat cuek dan berbasu-basi menunjukkan tidak percaya dan menerima makna sebuah pesan, kecuali terhadap manusianya diberi paham dan keyakinan makna terhadap hikmah sebuah pesan. Oleh sebab itu, di dalam pesan tersebut tidak lain menanamkan keyakinan luhur akan keabadian dan kejayaan Tanete sepanjang masa, serta terkandung nilai proyeksi yang menakjubkan, bahwa sesudah kejayaan datanglah kemunduran, dan niscaya sesudahnya menyusul datangnya kebangkitan.

Dengan demikian, kebenaran dalam wasiat itu, tampaknya telah dibuktikan sejarah, bahwa pada zaman penjajahan, Tanete dalam keadaan miring, pada masa kemerdekaan Tanete telah jatuh bertelungkup, bahkan segala posisi sudah tenggelam dan hanyut. Dan kini waktunya telah terhingga dan sisa ditunggu dengan kebangkitan Tanete dalam keadaan kembali seperti pada permulaannya. Pesan di atas bersambungan lagi dengan pesan berikut ini berkata : "*Lewa Mui Parimeng Tanete, Narekko' Reweni Pari-meng Memengnge*

Arung Yarega Datu ri Tanete “Artinya : Tanete kembali normal, jika Raja pemilik tahta kembali memerintah

Berkata seseorang mengaku diri nama Andi Makkulau, tinggal di Gattareng; bahwa kapan riwayat Raja atau *Datu MatinroE ri Coppo’* bergeming dibahas atau diperbincangkan orang, maka semangat kehidupan Lalabata akan kembali seperti dahulu. Oleh sebab itu, dalam menyimak kejutuan pesan/wasiat yang bersintesis dengan kesimpulan tentang biografi Raja Tradisional di Coppo bernama *Petta Baso* atau *Puang Beddu*, tentu saja dengan berbagai dalilnya telah diyakini sepanjang jauh di atas tanah-tanah Lalabata yang merupakan konsekuensi di bawah kekuasaannya, yakni Pemangku Adat/Tradisional terakhir di Tanete bergelar *Arung Tompo Bulu’ Matinro’E ri Coppo’*, wilayah kekuasaannya merupakan sisa peninggalan Ayahandanya sendiri *La Patau Datu Tanete Terakhir* (w. 1841); sebagai salah seorang Raja di Sulawesi-Selatan yang melawan ekspedisi Belanda tahun 1824 (Manuskrip dalam Bahasa Belanda: 151-8). Beliau ini sebelum wafatnya memang telah mengundurkan diri sebagai Raja berwibawa, sehingga kehormatan baginya secara tradisional tetap digelar *Raja Toa* (Rahman Nurhayati, 2008 : 57) atau (Walinono Hasan, 1979: 38). setelah ia berjuang melawan dan bertahan beberapa waktu bersama dengan penjajahan Belanda di Tanete; Tentu saja baginya bukan menunjukkan serupa dengan orang-orang berasal dari daerah lainnya sebagai saja Raja Boneka atau istilah *To Masaleppang Akarungeng* bahasa Bugis.

Terkait dengan hal di atas, suatu ungkapan dari seorang Tokoh bergelar *Jennang Mangade*, sebagai-mana disampaikan *La Hae Bin La Manggong*, berkata; “*Majepu TongengE Datu ri Tanete Tellengngi, yarega Tallemmei, Masubbui yarega Tapalii; Naiya RapangngE (Tau Ripakewe BalandaE) Malekkuni, Menreni Tau Beccu’E (Hasil Wawancara)*. Ungkapan serupa dengan maksud terdahulu, dikemukakan sebagai dianalogikan oleh A. Batu Eja; Ibarat Raja adalah batu besar, sedangkan Rakyat ibaratnya pasir, beliau menyampaikan lagi dalam bahasa Bugis; *Narekko’ Talemei Batu’E Menre’I Kessi’E, Tapi’ Sisemua Matu Kedo Batue, Len’nye Manenni Kessi’E* (Hasil Wawancara).

Demikian ungkapan orang-orang tertentu dalam analoginya, bahwa lontara *Panngadereng* di Tanete sedang misteris tersembunyi sejak lama, dan diyakini waktunya akan berputar kembali ke habitatnya. Demikian pula, kata seorang bernama *La Rappe* di Botto-Botto Tanete Riaja, mengemukakan hal serupa (Hasil Wawancara). “*Iyatu TongengE Datu yarega Arung ri Tanete Mabiringi ri Sapo’E, Tapi Engka Wetuna Matu Nalesu Maditengnga Parimeng.*” Maksudnya, kalau dahulu Raja memerintah, dan sekarang Raja sementara dipinggir, tetapi akan pada suatu waktu Raja kembali memerintah.

Coppo' adalah areal tempat para *Pampawa Ade'* dan *Pakatenni ade* dilantik pada zaman dahulu, di sana terdapat sebuah Soraja pernah berdiri, rumah kediaman *Raja Andi Beddu Paraongi Petta Baso*, serta di sana dimakamkan bersama dengan seorang permaisurinya *Andi Fatimah* dan tidak melahirkan keturunan. *Raja Andi Beddu Puang Baso* hanya melahirkan seorang anak laki-laki bernama *Andi Ayyub Dg Pasolong* dalam hubungan perkawinan Sang Raja dengan Putri keturunan Arung Belo/Datu Lompulle' *Andi Isa Petta Koro* di Lappa Belo Kerajaan Soppeng. Dalam popularitas sepanjang di Kabupaten Soppeng, Putra semata wayang Raja tersebut, lebih akrab, dan secara singkat digelar *Dg. Pasolong* dan *Dg. Massikki'*, Ia dalam keluarga besar disapa *Petta Solong*, *Puang Solong*, dan *Puang Sikki'*.

Coppo adalah bahasa Bugis berarti puncak, dari fenomennya sudah pasti menunjukkan kebesarannya dan ketinggiannya, bahwa selain di sana tiada tempat yang sederajat dengannya di Kabupaten Barru ini, secara alamiah menunjukkan keagungan dan keistimewaan, dan secara tekstural termasuk siapa gerangan sosok raja di sana, dan siapa pula gerangan pribadi ahliwaris keturunannya, (Hasil Wawancara).

Coppo Lalabata Tanete, adalah situs kerajaan tak dapat diboongi, alam sekitarnya sebagai saksi, orang-orang bijak bisa mengerti dan memaknainya. Coppo terhitung selain Lalabata sebagai tanah pusat kerajaan, juga terikat nama kampung Bacu-Bacu dan Matajang. Dari sekian nama tersebut, Coppo mempunyai keakraban emosional dengan Kerajaan Tetangganya; Soppeng dan Bone. Dalam hal ini, alangkah tidak bijak-sana keturunan ahliwaris, kalau saja situs Coppo tidak maksimal disikapi. Dalam tradisi sejarah, di mana disaksikan pernah berdiri Saoraja, maka di sana membuktikan bekas kediaman Raja sekaligus pusat kerajaan, dan di sana pula teridentifikasi adanya pekuburan Raja. Dengan demikian, Coppo sangat signifikan memiliki banyak situs hendaknya digali atau diangkat se-segera mungkin.

Datu Andi Beddu Petta Baso meninggal, ketika perlawanan beliau menghadapi even kawanan para perampok, konon beliau sendiri dapat melawan aksi perampokan terdiri atas 40 orang perkiraan terjadi antara tahun 1898 – 1902 M. Ketika itu even perampokan di Kerajaan-Kerajaan memang merajalela. Sehingga konon hal itu, salah satunya dijadikan alasan bagi Belanda untuk menciptakan komplenn yang meledakkan terjadinya perang sekutu melawan ekspedisi III (Berita Harian Fajar, 10 Oktober 2003). Yakni salah satunya sebab diangkat Belanda untuk menuduh *La Pawawoi Karaeng Segeri Arumpone* terakhir (Ibid) sebagai pendalang perampokan di Kerajaan-Kerajaan, termasuk di Coppo

Kerajaan Tanete. Jadi, *Datu Petta Baso Puang Beddu* di Coppo meninggal mendahului agresi Belanda terakhir di Sulawesi-Selatan pada tahun 1905-1906 M. Beliau meninggalkan dua orang Isteri dan satu orang Putra, seperti telah diuraikan di atas.

Sekilas Pembahasan Antropologis-Arkeologis Khususnya *Panngadereng* di Tanete

Saoraja konon bernama *La Pinceng* di Coppo, (H. Zainuddin: Wawancara). Dari namanya menunjukkan adanya hubungan emosional dengan salah satu Saoraja di wilayah Swapraja Soppeng Riaja sejak penjajahan sampai terbentuk Kecamatan berpusat di Mangkoso. Konon menurut salah satu versi, bahwa Kerajaan Balusu terbentuk kemudian sebagai serambi Kerajaan Tanete disebut *Jongke'* bahasa Bugis.

Jongke artinya, bahagian rumah adat Sulawesi-Selatan, terletak dibelakang rumah Induk/besar/Utama, terdapat dapur dan ruang makan; jadilah Soppeng Riaja hanya memang siap mengurus makan atau membuat kenyang. Sementara Tanete memang pandai bidang strategi dan kuat berargumentasi mengambil keputusan dan gagasan. Oleh sebab itu, di sinilah timbul dan berkembang stereotipe mengenai watak berbudaya di antara bekas Kerajaan atau Swapraja di Kabupaten Barru, berkata; “ *Politi ri Tanete, Sere Ati ri Berru, Ajung-kajung ri Soppeng Riaja, Loppo Sadda ri Palanro Mallusetasi*.”

Ada informan berkata, di antara ketiga kerajaan masing-masing bersahabat atau bersaudara, Yakni ketiganya merupakan satu kesatuan diserupakan dengan sebatang tubuh, terdiri atas organ kepala, badan/ perut, dan ekor. Kerajaan Tanete mengambil posisi teratas dan terdepan, menyebabkan Tanete memang banyak berfikir dan pemimpin di atas yang lain. Kerajaan Balusu yang Swapraja Soppeng Riaja terletak di bagian tengah terdapat perut penampung makanan, menyebabkan Balusu atau Soppeng Riaja banyak mengeksport beras dan dipercaya menerima tetamu, Kerajaan Nepo yang Swapraja Mallusetasi, mengambil posisi paling jauh, seperti bagian ekor, menyebabkan Nepo atau Mallusetasi memang harus membesarkan suara atau tukang pukul /algojo.

Oleh sebab itu, antara kecamatan-kecamatan dari tiga bekas Swapraja memiliki hubungan sosiologis sangat kental, baik karena alasan sejarah dari aspek budaya sosial politik, maupun aspek hubungan etnis masih akrab. Dari semuanya rata berasal keturunan dari salah satu daerah induk “ *Boccoe* ” yaitu Kerajaan Soppeng.

Dengan demikian, Kerajaan Tanete memang disebut tenggelam dan bersembunyi; keturunannya selaku ahliwaris sejak lama bermasa bodoh, atau sedang asyik menikmati tidur, diam seribu diam di serambinya di Mangkoso

Soppeng Riaja, tempatnya di salah satu pesantren terkemuka di Indonesia. Kenyataannya bukan kebetulan dengan apa adanya, tetapi itu suatu perspektif kenyataan terpaksa diterima dan diresponi. Selain didukung aspek sejarah sebagai digambarkan, juga aspek tidak kurang pentingnya, adalah menyerahkan segalanya kepada Ikhtiar Allah swt dan kemahakuasaan-Nya.

Penulis adalah ahliwaris generasi ketiga dari Datu Kerajaan Tanete *MatinroE ri Coppo Lalabata*, mengambil perhatian atas kebangkitan “ *Panngadereng* ” di Tanete, setelah Allah swt menganugerahkan takdir berziarah atau berwisata pertama kalinya di Coppo, terjadi di penghujung Desember 1999 M., bertepatan saat menyongsong abad baru disebut millenium, suatu abad memangnya menghidangkan trans-paransi atau keterbukaan. Dengan demikian, kalau saja dahulu sekadar dianggap idealisme semata, melainkan kini fakta mulai berbicara, bahwa kebangkitan *Panngadereng* tinggal menunggu bom waktu seraya membawa dan menyusun kebenaran, kepalsuan politik harus ditanggalkan, kebenaran akan tiba waktunya, untuk kembali merevisi kebatilan.

Oleh sebab itu, mungkin tidak salah ungkapan, kalau saja kebetulan di sini dibanggakan, *Mangkoso Wanua Malebbi'*, *Wanua Silusereng BarakkaE Gurutta To PanritaE Ambo Dalle' Masibawa Manenungeng*, *Wanua Onrong Pura Matinrona Ana Eppona Datu E*, *Massobbu Matinro Silampe Etana ri Jongkena Mancaji Soppeng Riaja..* Tentu saja kesimpulan di atas, terkontaminasi dengan sebuah adegan dalam “ *Panngadereng* ” *Mapakarajai Sara'e (Panrita'E) ri Ade'e (Arung'E)*, *Mapakalebi'I ArungE (Ade'E) ri PanritaE (sara'E)*.

Saoraja di Coppo diapit oleh dua buah sumur terletak di depan dan dibelakang, sumur bagian belakang digelar “ *Bujung Lompo* ” artinya sumur agung, konon mempunyai keunikan, karena airnya kelihatan dua macam. Kedua sumur tersebut, sekarang sedang tertimbun setelah lokasi dijadikan lahan persawahan sejak kira-kira lima puluhan tahun silam, luas tanahnya berkisar 20 Ha. Semua baru merupakan tanah adat pekarangan Saoraja dan taman perkebunannya; dari taman perkebunan terdapatlah makam Raja Petta Baso dan Permaisurinya Andi Fatimah.

Pada zaman Belanda, segala peninggalan Petta Baso, sisa pengurusannya di bawah kekuasaan Andi Baso Pancana, yaitu Penguasa atau Datu, bertindak kaki tangan/*To Masalepang* sebagai boneka Belanda di Tanete sampai berhenti alias meninggal pada tahun 1962 M. di Panincong akibat sakit keras. Meski beliau berkuasa di atas tanah-tanah adat, tetapi beliau tetap konsisten tidak berniat memiliki atau mengkhianat. Kejujurannya dibuktikan, bahwa tanah adat areal Saoraja di Coppo tetaplah terdokumentasi di pertanahan

(*land rente*) tahun 1945 atas nama *Dg. Pasolong*, yang ahliwaris pemilik satu-satunya tanah adat di Tanete. Dengan demikian, betapa kiranya kebesaran pada diri *Petta Baso MatinroE ri Coppo*, tanah tempat kediamannya saja, menunjukkan luas berkisar 20 ha; sudah dapat dibayangkan betapa luas lagi tanah-tanah adatnya di tempat lain.

Menurut beberapa sumber, termasuk ayahanda penulis (*Andi Zaenong*) salah seorang anak kandung *Petta Solong*, bahwa kakek *Datu Petta Baso* meninggalkan hewan ratusan ajoa (*Bugis* 1 = 2 ekor), baik kerbau maupun kuda. Hewan kerbau dilepaskan bebas di tempat kategori basah, lumpur atau rawa-rawa di *Pancana*. Orang-orang *Lalabata* sekarang masih banyak menyebutkan rawa-rawanya tersebut sebagai “ *Lempong LowangE* “. Tempat tanah adat *lempong* tersebut di antaranya disebut “ *La Mangkea* “ dan “ *La Jonga* “; sejak adanya koperasi tujuh di Tanete 1957, tanah adat “ *Lempong* “ tersebut mulai disulap menjadi tambak, termasuk atas persetujuan dan kordinasi *Datu Haji* dan *Andi Iskandar Unru*.

Berdasarkan kebijakan *La Nakka* sebagai Bupati Pertama di *Barru*, tanah-tanah tersebut dibagi-bagikan kepada setiap Anggota *Legium Veteran RI* pada tahun 1964. Beliau sebelum menjabat Bupati *Barru*, memang ia adalah Kepala Kantor *Veteran RI* di *Makassar* (*Berita Harian Fajar*, 18 Pebruari 2003). Mereka para anggota veteran adalah rata sudah pada menjual bagiannya; mengapa mereka pada menjual ? Tentu di situ terpendam suatu dilemma, apakah sah dimiliki menurut hukum adat ? Menurut pesan *Datu Haji Andi Baso Pancana*, bahwa tanah adat kerajaan tidak dimiliki, boleh saja dikuasai dan hasil-hasilnya halal diambil, tidak boleh dijual atau dibeli, karena kelak pemiliknya akan kembali datang mencarinya, kewajiban saja memelihara harta benda tersebut, milik keluarga orang-orangnya sementara merantau disebut *Sompe'* bahasa *Bugisnya*. Kalau memang pemiliknya kembali datang, mampukah kalian menggantikannya ? Kalau kalian ada menjual. Begitu pula, mampukah kalian bertahan kalau kalian ada membeli (*La Hae* dan *La Rappe*; Wawancara).

Menurut sumber lebih jauh, *Datu Haji* tidak pernah berniat memiliki tanah adat, beliau sekadar bertindak menguasai (*bezitter*), atau saja beliau mengatakan, bersedia membeli tanah-tanah yang lain, kalau ada saja pemilik tanah mau menjual kepadanya (*La Rappe*; Wawancara). Sesungguhnya tidak ada hak kepemilikanku tanah di Tanete, kecuali dengan transaksi jual-beli, alias beliau tidak memiliki hak kewarisan, kecuali di wilayah Kerajaan *Soppeng*. Tentu saja, beliau menurut sistem tradisional bukannya seseorang dikenal *Ade' MappuraonroE*, melainkan ia seseorang saja digelar *Ade' Maraja*, yakni seorang keluarga berdimensi istilah *To Saliweng* atau *To Tama-tama* bahasa *Bugis* artinya seorang Non Pribumi/Pendatang.

Bukan sekadar “ *lempong* ” bisa dilacak, tetapi juga sampai dimana kerbau-kerbaunya pergi mencari makan, berapa luasnya persawahan menggunakan tenaga kerbau dan kuda dipakai membajak, maka sampai di sana ukuran batas dan luasnya tanah adat. Menurut beberapa keterangan, persawahannya terdapat 41 lokasi (di sini bukan berbicara berapa petaknya), luasnya tidak diketahui jumlahnya. Demikian pula, keadaan-nya kuda, banyak dilepaskan di areal tempat disebut “ *Padang atau Flora* ”, terletak misalnya di Poddo Tanete Riaja (Hasil Wawancara), *Petta Solong* sebagai anak adat, konon masih memanfaatkannya hingga akhir hayatnya tahun 1957 M.

Beliau meninggal di Kabupaten Soppeng di salah satu Dusun disebut Lajoanging Wae Pute, di pangkuan salah satu isterinya paling termuda bernama *I Kame* (penulis menyebutnya *Nene' Kame'*). Di sini bukan kebetulan atau sengaja membuat jenaka dan lucu; *I Kame* artinya kiamat, maka *Petta Solong* ditakdirkan Allah swt menghadapi kiamat, dan berakhirilah riwayat hidupnya di sana.

Petta Solong dalam legendanya, ia mahir dan santai di atas kuda tunggangannya, sambil kuda berjalan cepat atau lambat, ia saja bisa berdiri dan menghadap ke belakang. Para generasi berusia 70 tahun ke atas saat tulisan ini dipaparkan 2005, masih terdapat orang-orang bernostalgia tentang diri dan pribadi *Petta Solong* kepada Penulis salah satu keturunannya. Demikian dari sekelumit ungkapan tentang diri beliau sebagai manusia langka, ia banyak mempunyai keajaiban luar biasa, misalnya bisa menghilang sendiri dari tempat-nya, sebagaimana figur orang-orang ajaib lainnya, *Petta Barang Petta Ri SappaE*. Keduanya dianggap pasangan sejoli, sebagai manusia berkaliber mistik. Konon menurut keterangan, kedua orang itu bersaudara sepupu, tetapi bagi penulis belum mengerti jelas tentang sepupu derajat berapa kalinya; antara *Petta Solong* dan *Petta Barang*.

Dalam sejarah sejak Kolonel H.D. Steur menyerang dan melumpuhkan Tanete kekuasaan Datu Lapatau tahun 1824 M. (Abd. Razak: 1986,28). maka kekuasaan sesudah itu di lapangan bercorak dualisme, selain terdapat kekuasaan asli / adat bersifat keturunan, juga terdapat kekuasaan dibentuk Belanda dan pengawasan berposko di Pancana. Pihak Belanda menggunakan sistem penguasa sebagai *Leenvorts* (Raja Pinjaman) terdiri atas orang-orang; *La Rumpang Megga Dulung Lamuru*, *La Sangaji Datu Bakke'*, *We Tenri Olle'* asal Mario Riawa, *I Pantjai Tana* dari Akkampeng; semuanya berasal asli dari luar atau Kerajaan Soppeng, pada saat itu mereka secara politis adalah Sekutu Belanda. Mereka bukan keluarga ahliwaris berhak Raja Kerajaan Tanete, kecuali sekadar mereka berhubungan kekerabatan. Oleh sebab itu, mereka saja lebih akrab digelar *Arung*

Pancana, I Pantjai Tana digelar *Arung Lalolang* (Manuskrip Bahasa Belanda, 155); dan sungguh semuanya bergelar sementara berdasarkan kediamannya, dan bukan diberi kewenangan yang sah dipandang secara tradisional di Tanete.

La Rumpang Megga seorang terdahulu diangkat Raja Pinjaman, ia berfungsi pengawas, dan penyeimbang disebut *Arung Pancana Toa*. Di dalam keluarga inilah lahir penyelamat naskah “ *La Galigo* ” bernama *We’ Colliq PujiE*. (Berita Harian Fajar, 18 Pebruari 2003). Oleh sebab itu, keinginan politik Belanda belumlah berkuasa mutlak di Tanete, sebab di dalam kewaspadaannya, masih terdapat kemungkinan timbul perlawanan, baik melawan Belanda maupun melawan sesama Kerajaan (Bandingkan, Mattulada: 462). Oleh sebab itu, Kerajaan Tanete tidak berhenti mempertaruhkan kekuatannya dengan melawan Kerajaan Barru salah satu sekutu Belanda. Terkenal peperangan, misalnya “ *Rumpa’ Lipukasi* ”, perkiraan terjadi antara tahun 1885-1905. *Petta Baso Arung Tompo Bulu* secara tradisional merangkul Butta Lipukasi kedalam kekuasaannya.

Petta Solong selaku Putra Raja dan bertindak Panglima waktu itu, peperangan diperoleh dengan kemenangan sangat gemilang; Ia terkenal gagah dan perkasa, berani menantang musuh-musuhnya. Konon dari kegagahan dan keperkasaannya, ia diberi gelar oleh Datu Kerajaan Soppeng, yakni penganugerahan tanda bintang bertitahkan nama gelar “ *Dg. Pasolong* ” seolah gelarnya ini seirama dengan gelar-gelar lainnya “ *Dg. Pabarang* ”, dan “ *Dg. Parani* ” misalnya di Kerajaan Balusu bergelar *Sulle Datu’E*.

Ada suatu riwayat, bahwa *Petta Solong* adalah pribadi seorang bangsawan, penantang setiap penjajahan, ia sepanjang hidupnya konsisten menolak dan antipati terhadap segala bentuk penjajahan di tanah air; Ia tidak pernah sebagai pelopor memilih cara mendapatkan kemerdekaan seperti sekarang ini. Dalam hal ini, salah satu catatan historis diperoleh penulis, bahwa *Petta Solong* dalam suatu perjalanannya antara Kampung Ajjakang dengan Kampung Kiru-Kiru di Swapraja Soppeng Riaja, tempat diberi nama *La Bawang*. Ia saja secara jantan mencederai seorang Bungken (petugas penjajah Jepang) yang sementara memandu pekerjaan jalanan yang digotong oleh rakyat. Ia diusahakan ditangkap untuk diproses verbal, namun setiap usahanya tidak mendatangkan hasil apa-apa.²

Dengan demikian, dari kejadiannya merupakan bukti nyata, bahwa di dalam pribadi *Petta Solong* senantiasa tertanam sikap anti penjajahan, terpelihara sebagai warisan leluhurnya, ia kelihatan dalam prinsipnya, bahwa pejjajaan

² Beberapa informasi berasal dari, antara lain; *La Pide*, Pekerjaan Tani / ex Tahanan NICA/Westerling, tinggal di Bojo, Kec. Mallusetasi; juga informan H. La Ugu/ H. Abd. Halim, pekerjaan ex Anggota DI/TII, tinggal di Mattoanging Soppeng Riaja, Barru.

dalam segala bentuknya merupakan lawan dan antagonis terhadap sistem “ *Panngadereng* ” di Sulawesi-Selatan.

SIMPULAN

Kesimpulan sebagai penutup dalam tulisan berjudul “ *Coppo Lalabata Tanete* ”, adalah sebagai berikut;

Coppo Lalabata Tanete adalah situs budaya “ *Panngadereng* ” tertinggi dan terpenting yang berkearifan lokal di Kabupaten Barru.

Coppo Lalabata Tanete tergambar kejatuhannya seiring dengan kejatuhan “ *Panngadereng* ” se Sulawesi-Selatan ke tangan penjajahan Belanda.

Coppo’ Lalabata Tanete di dalam “ *Panngadereng* ” kembali bergema yang mengawali kebangkitannya di tangan ahliwaris, setelah se abad terselubung dan tersimpan di bawah panji negara yang bergeliman dengan kebatilan dan penyimpangan sejarah, serta kehancuran peradaban asli khususnya di Sulawesi-Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Al Qur’an Al-Karim
- (2) Abu Zahrah, Muhammad. 1987 M. /1377 H. Ushul - Al-Fiqh. Cairo : Dar Al-Fikr.
- (3) Andaya, Y. Leonardo. 2004. Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi-Selatan Abad Ke 19 . Makassar: Innawa.
- (4) Balandier, Georges. 1986. Antropologi Politik (Penerjemah Y. Budisantoso). Jakarta: CV. Rajawali.
- (5) Jamali, R. Abdul Rauf. 1999. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : PT Grafindo Persada. Cet. V.
- (6) Majid M. Dien & Johan Wahyudi. 2016. Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- (7) Mattes, B. F. 1872. Boegenesche Cretomatie. C.A. Spin & Zoon Amsterdam.
- (8) Mattulada. 1995. Latoa Suatu Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. Ujungpandang: Hasanuddin University Press.
- (9) Poelinggomang, Edward. L. 2004. Perubahan Politik & Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942 Jakarta: Ombak.
- (10) Rahim, Abdul. 2005. Sistem Pemerintahan Tradisional Di Bekas Kerajaan Barru, Tinjauan Antropologi Politik. Tesis, PPs. UNHAS.
- (11) Rahman, Nurhayati. 2008. Retna Kencana Colliq PujiE Arung Pancana Toa 1812-1876 Intelektual Penggerak Zaman. Makassar : Lagaligo Press,
- (12) Razak, Abdul Daeng Patunru. 1986. Sejarah Bone. Ujungpandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi-Selatan.

- (13) Sunarmi. 2016. Sejarah Hukum. Rawamangun Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cet. I.
- (14) Syalabi, Ahmad. 1988. Sejarah dan Kebudayaan Islam, Imperium Turki Usmani. Jakarta : Kalam Mulia, Cet. I
- (15) Walinono, Hasan. 1979. Tanete Suatu Studi Sosiologi Politik. Disertasi. Universitas Hasanuddin Ujungpandang
- (16) Wensinck, A. J. 1936. Concordance Et Indies De La Tradition Muslimane. Leiden: E.J. Brill. Juz I
- (17) Zaenong, Andi M. Anwar. 2009. Sistem Politik Tradisional Di Soppeng Riaja Bekas Kerajaan Kiru-Kiru dan Balusu Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan, Suatu Studi Antropologi Politik. Tesis PPs Universitas Hasanuddin
- (18) . . . , “ Institusi Swapraja Soppeng Riaja “, dalam “ Jurnal Attoriolong “ Vol. VIII. No. 2 Juli-Desember 2008. Diterbitkan Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- (19) . . . , “ Mangkoso Kota Santri Perspektif Bumi Hak Milik Tradisional Kerajaan Laboso Soppeng Riaja “ dalam “ Jurnal Risalah Addariyah “ Vol. III No. 1 Januari – Juni 2017. STAI-DDI Mangkoso-Barru
- (20) . . . “ Sistem Politik Tradisional, Sejarah Institusi Dan Lembaga Politik Kabupaten Barru; Studi Sejarah Dan Antropologi Politik “ dalam “ Kuriositas “ Vol. 11, No. 2 Desember 2017. P3M STAIN Pare-Pare
- (21) . . . , “ Berkiprah Dengan Kelembagaan Politik Tradisional Kabupaten Barri “ dalam “ Jurnal Al-Ulum “ Vol. 18 No. 1 Juni- Desember 2018. IAIN Gorontalo
- (22) . . . , “ Titik Awal Kelahiran Barru “ dalam “ Harian Fajar “, Selasa 18 Pebruari 2003
- (23) . . . , “ Legenda La Pawawoi Karaeng Segeri “ dalam “ Harian Fajar “, Kamis, 10 Oktober 2003.
- (24) . . . , “ Mewujudkan Pancana Menjadi Desa Budaya “ dalam “ Harian Fajar“, Selasa 18 Pebruari 2003.
- (25) . . . “ Edward, L. Polinggomang, Miris Lihat Anak-Anak Kurang Peduli Sejarah “ dalam “ Harian Fajar“, 16 Oktober 2011.
- (26) . . . , Lontara Sukku’na Wajo, (Proyek Naskah UNHAS Ujungpandang, tth.).
- (27) . . . , “ Silzilah Raja-Raja Se Wilayah Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan.
- (28) . . . , Terdaftar Tanah Ketetapan IPEDA pada tahun 1945 an. Dg. Pasolong, dikeluarkan Ka Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA Pare-pare, Marjono/Nip.060031643 tgl 26 Agustus 1982.